

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini / PAUD memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek kompetensi, tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter. Periode awal kehidupan anak kerap dipahami sebagai masa emas (*golden age*), mengingat pada tahap ini perkembangan fisik, sosial, serta emosional berlangsung secara intens dan pesat. Di masa inilah dasar – dasar kehidupan mulai terbentuk. Maka, wajar jika layanan pendidikan pada tahap ini menjadi pijakan awal bagi perjalanan pendidikan anak selanjutnya. Di Indonesia, perhatian terhadap PAUD terus menguat dari waktu ke waktu. Dukungan kebijakan semakin jelas, dan keterlibatan masyarakat pun kian terasa Pemerintah secara eksplisit menempatkan PAUD sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Nasional melalui sejumlah kebijakan dan regulasi. Hal ini tercermin dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 yang mengatur tentang standar nasional PAUD.

UU Pasal 1 ayat (14) Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PAUD merupakan bentuk pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun, yang dilaksanakan melalui pemberian stimulasi pendidikan, baik pada aspek fisik maupun psikologis, dengan tujuan mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Nur Cholimah (2008) dalam Arifudin (2021:15) yang mengemukakan bahwa PAUD merupakan upaya yang disusun secara sadar dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal melalui pengalaman belajar serta pemberian stimulasi yang terintegrasi. Melalui pendekatan ini, anak diharapkan dapat tumbuh dengan kondisi fisik yang sehat, mencapai perkembangan yang optimal, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Dalam praktiknya, keberadaan guru menjadi kunci dalam penyelenggaraan PAUD. Guru tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi hadir sebagai pendamping, pengasuh, sekaligus fasilitator yang menopang perkembangan kognitif, sosial, emosional, hingga moral anak. Artinya, mutu layanan PAUD tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana atau kurikulum, melainkan sangat bergantung pada kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai pelaksana utama pembelajaran. Seorang pendidik PAUD terlibat langsung dalam seluruh proses, mulai dari merancang kegiatan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan penilaian. Di saat yang sama, mereka juga mengelola administrasi kelas serta menangani berbagai dinamika psikologis anak mulai dari pencegahan masalah, penanganan, sampai pada tahap pemulihan (Maryatun, 2016). Peran yang demikian luas menunjukkan bahwa guru PAUD memikul tanggung jawab yang tidak ringan, baik secara profesional maupun emosional.

Tanggung jawab besar yang dipikul guru pada dasarnya sudah diakui secara hukum melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak, setidaknya berada di atas kebutuhan hidup minimum. Selain itu, mereka juga berhak atas jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta kesempatan untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan guru bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian penting dalam menjaga mutu pendidikan, termasuk pada jenjang PAUD. Dodge dkk. (2012) memandang kesejahteraan kerja sebagai kondisi yang dinamis, ketika seseorang mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, tekanan psikologis, dan kapasitas pribadi dalam menghadapi situasi kerja. Kesejahteraan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti dukungan lingkungan kerja, perlakuan adil, serta adanya penghargaan atas peran dan kinerja guru. Faktor – faktor inilah yang membantu menciptakan suasana kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Sayangnya, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan harapan tersebut. Kondisi kesejahteraan guru PAUD masih memprihatinkan. Di Jakarta, kondisi kesejahteraan guru PAUD masih menjadi sorotan. Disebutkan bahwa insentif

yang mereka terima berkisar sekitar Rp.550.000 Per-bulan, jumlah yang sangat jelas berada jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Pernyataan tersebut disampaikan oleh ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, ketika menerima kunjungan dari perwakilan HIMPAUDI pada Jum'at, 7 Maret 2025 (Liputan6.com). Angka tersebut menjadi gambaran bahwa di balik besarnya tanggung jawab yang dipikul, masih ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Honor Guru di DKI Jakarta 2024

Kategori Pekerja	Persentase	Rentang Pendapatan Per bulan
Pekerja Formal	63,69%	Rp. 1.900.000 – Rp. 5.000.000
Pekerja Non – formal	36,31%	Rp. 300.000 Ribu – Rp. 2.100.000

Sumber.: Data diolah peneliti, 2025

Data. tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang cukup mencolok antara pekerja formal dan non – formal. Kelompok formal yang mencapai 63,69%, memperoleh penghasilan yang lebih stabil dengan rentang gaji Rp. 1,9 Juta – Rp. 5 Juta per bulan, sedangkan kelompok non – formal yang berjumlah 36,31% berada pada level pendapatan yang jauh lebih rendah yakni Rp. 300 Ribu hingga Rp. 2,1 Juta. Gambaran ini sejalan dengan realitas guru foral dan non – formal terutama guru PAUD, di mana guru formal biasanya mendapatkan gaji yang lebih terjamin serta dukungan kelembagaan yang jelas, sementara guru non – formal kerap berhadapan dengan pendapatan yang tidak menentu, minimnya tunjangan, dan status kerja yang kurang pasti. Perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan variasi status pekerjaan, tetapi juga menunjukkan ketimpangan kesejahteraan yang memengaruhi kondisi hidup, motivasi profesional, dan peluang guru non – formal untuk memperoleh pengembangan kompetensi yang setara dengan guru formal.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan PAUD di Indonesia adalah aspek pendanaan dan tenaga pendidik. Sebagian besar lembaga PAUD, khususnya

yang bersifat non – formal atau swasta masih mengandalkan dana operasional dari masyarakat, seperti iuran orang tua murid yang cenderung fluktuatif dan tidak mencukupi untuk menjamin mutu layanan pendidikan. Hal tersebut berdampak langsung pada kualitas sarana – prasarana, program pembelajaran, hingga kesejahteraan guru PAUD itu sendiri. Jika dibandingkan dengan rekan - rekannya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, guru PAUD sering kali menghadapi ketimpangan antara beban kerja yang besar dan kompensasi yang diterima. Padahal, di tangan merekalah fondasi awal kehidupan anak – anak dibentuk. Mereka bukan sekedar mengajar, tetapi juga menanamkan nilai, kebiasaan, dan cara berpikir sejak usia yang sangat dini. Ketimpangan antara besarnya tanggung jawab dan minimnya penghargaan yang diterima tentu bukan hal sepele. Kondisi seperti ini berpotensi memengaruhi motivasi kerja, bahwa bisa berdampak pada kualitas proses pembelajaran yang mereka berikan kepada anak – anak.

Dalam konteks ini, dua aspek yang diyakini sangat memengaruhi kesejahteraan para guru PAUD adalah bagaimana lembaga mereka dikelola secara efisien serta sejauh mana pimpinan organisasi benar – benar menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan guru. Saat anggaran, waktu, dan tenaga yang dikelola secara tepat, lingkungan kerja cenderung terasa lebih tertata dan kondusif. Ritme pekerjaan menjadi lebih jelas, beban tidak menumpuk secara berlebihan, dan pada akhirnya produktivitas pun bisa meningkat dengan lebih stabil. Namun itu saja belum cukup, diperlukan juga kepedulian nyata dari para pimpinan seperti dukungan emosional, finansial, hingga profesional untuk benar – benar menciptakan lingkungan kerja yang memberdayakan sebagaimana diamanatkan dalam [Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional PAUD.

Disamping peran pemerintah pusat melalui kebijakan Nasional, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan guru PAUD. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut tercermin dalam penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD. Kebijakan pemberian hibah ini mencerminkan keseriusan

pemerintah daerah dalam memperkuat mutu pendidikan anak usia dini sekaligus memberikan dukungan finansial bagi para guru, terutama mereka yang mengabdikan di satuan PAUD nonformal dan belum menerima pengasilan yang memadai. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan kondisi ekonomi guru menjadi lebih stabil sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan secara lebih optimal.

Melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta setiap tahun mengalokasikan anggaran hibah bagi guru PAUD yang disalurkan secara selektif melalui wadah seperti HIMPAUDI. Program tersebut berperan sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan yang signifikan, terutama bagi para pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dukungan ini meringankan beban ekonomi guru, mengingat banyak di antara mereka yang hanya mengandalkan honor dari iuran orang tua murid yang jumlahnya terbatas. Namun belakangan ini muncul persoalan yakni pengurangan jumlah penerima bantuan hibah dari pemerintah akibat adanya efisiensi anggaran yang diatur didalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh banyak lembaga PAUD, terutama yang berada di bawah naungan swasta atau komunitas masyarakat, kemampuan dalam mengelola anggaran secara efisien menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kesejahteraan pendidik. Semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, pemberian insentif atau honorarium bagi para guru PAUD terkena pemangkasan anggaran.

Tabel 1. 2 Data penerima hibah HIMPAUDI Jakarta Timur Tahun 2025

No	Kecamatan	Quota Penerima Hibah 2024	Quota Ajuan Hibah 2025	Quota Dapodik dasmen 2025	Quota Setelah Pengurangan 2025	Selisih Dari Ajuan 2025	Quota 2025
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Cakung	259	287	238	235	-52	-55
2	Duren Sawit	363	371	292	289	-82	-85
3	Jatinegara	293	326	234	231	-95	-98
4	Matraman	177	187	158	155	-32	-35
5	Pulo Gadung	177	198	163	160	-34	-37
6	Cipayung	176	176	142	139	-37	-40
7	Ciracas	280	294	190	187	-107	-110
8	Kramat Jati	257	257	237	234	-23	-26
9	Makasar	157	153	130	127	-26	-29
10	Pasar Rebo	148	159	140	137	-22	-25
HIMPAUDI Jakarta Timur		2287	2404	1924	1894	-510	-540

Sumber: HIMPAUDI Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa alokasi dana hibah bagi guru PAUD di Daerah Khusus Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Timur, menunjukkan kecenderungan penurunan. Kondisi ini berkaitan dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur upaya penghematan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampak kebijakan tersebut tercermin pada berkurangnya jumlah penerima hibah di seluruh kecamatan. Penurunan ini tidak hanya terjadinya secara merata, tetapi juga menunjukkan selisih yang cukup besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memberikan pengaruh langsung terhadap skema bantuan bagi guru PAUD di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.287 guru PAUD di Jakarta Timur yang menerima bantuan hibah, jumlah tersebut meningkat menjadi 2.404 guru yang melakukan pengajuan penerima hibah untuk periode tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya harapan dari pihak lembaga guru PAUD untuk mempertahankan bahkan memperluas dukungan pendanaan bagi para guru. Namun setelah dilakukan validasi data melalui Dapodikdasmen per tanggal 12 Maret 2025, jumlah guru yang memenuhi syarat administratif berkurang menjadi 1.924 guru. Melalui proses seleksi tambahan dan penyesuaian kuota berdasarkan kebijakan efisiensi, jumlah akhir penerima hibah ditetapkan sebanyak 1.894 guru. Ini berarti terjadi pengurangan sebanyak 510 guru atau selisih 540 guru dibandingkan dengan jumlah pengajuan awal. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan wilayah, hampir seluruh kecamatan di Jakarta Timur mengalami pemangkasan kuota. Beberapa kecamatan dengan penurunan jumlah tertinggi yaitu Jatinegara sebanyak 95 guru, Duren Sawit sebanyak 82 guru, dan Ciracas sebanyak 107 guru.

Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah ajuan dari HIMPAUDI, keterbatasan anggaran mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kuota secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan guru PAUD, khususnya mereka yang tergabung dalam lembaga non – formal atau swasta. Sebab, kelompok ini sangat bergantung pada hibah sebagai salah satu sumber utama pendapatan mereka.

Selain itu, status guru PAUD non – formal yang belum diakui secara resmi seperti halnya guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah membuat mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap hak – hak profesi termasuk kesempatan mengikuti

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Padahal, PPG merupakan jalur strategis yang dapat digunakan oleh guru honorer untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh sertifikasi pendidikan, serta membuka peluang untuk diangkat menjadi ASN melalui mekanisme PPPK atau PNS. Tidak diakuinya status formal guru PAUD non – formal menyebabkan mereka tertinggal dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan. Ketimpangan ini turut berdampak pada penurunan semangat kerja dan kualitas hidup para guru PAUD.

Situasi ini dapat terlihat jelas di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Mayoritas lembaga PAUD dikelola oleh masyarakat atau yayasan bukan langsung oleh pemerintah. Konsekuensinya banyak guru PAUD menjalankan tugas mereka dalam kondisi kerja yang tidak ideal baik dari segi pendapatan, perlindungan hukum, maupun pengakuan status profesional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan dan praktik pengelolaan PAUD di tingkat lokal. Banyak lembaga belum menjalankan prinsip efisiensi secara optimal sehingga alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan guru seringkali tidak menjadi prioritas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan PAUD, khususnya di wilayah Jakarta Timur, tidak bisa dilepaskan dengan isu kondisi kesejahteraan guru. Tingkat kesejahteraan pendidik PAUD masih tergolong rendah, terutama pada satuan PAUD non – formal yang pembiayaannya sangat bergantung pada kontribusi masyarakat. ketergantungan terhadap iuran orang tua peserta didik yang sifatnya tidak tetap menyebabkan penghasilan guru menjadi tidak stabil. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tuntutan tugas yang besar dengan imbalan finansial yang diterima. Padahal, guru PAUD memegang peranan penting dalam membangun karakter, mengembangkan kemampuan dasar, serta membentuk fondasi kepribadian anak pada masa awal pertumbuhannya.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdampak secara langsung terhadap jumlah guru PAUD yang menerima bantuan hibah dari pemerintah. Penyesuaian anggaran yang

dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan tidak semua guru yang sebelumnya memperoleh bantuan dapat terus menerimanya. Kondisi tersebut berdampak pada semakin rapuhnya tingkat kesejahteraan guru, khususnya bagi mereka yang mengajar di satuan PAUD non – formal dan menjadikan dana hibah sebagai sumber utama pendapatan, hilangnya dukungan finansial ini memperbesar risiko ketidakstabilan ekonomi bagi guru serta memengaruhi keberlangsungan layanan pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah lebih dampak efisiensi anggaran terhadap kesejahteraan guru PAUD, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus diarahkan pada guru (PAUD) nonformal yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari sepuluh tahun. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa guru PAUD dengan masa pengabdian yang panjang telah melewati berbagai perubahan kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan sistem pendanaan dan pengelolaan PAUD non – formal. Kondisi ini memungkinkan responden memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai perubahan tingkat kesejahteraan yang terjadi sebelum dan sesudah kebijakann efisiensi anggaran tahun 2025 diberlakukan.

Penelitian ini dibatasi pada rentang tahun anggaran 2024–2025, yaitu periode awal diberlakukannya kebijakann efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pembatasan ini sengaja diterapkan agar pembahasan lebih terfokus dan tidak melebar ke periode di luar konteks kebijakan tersebut. Dengan batasan ruang lingkup yang terdefinisi secara jelas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaranm yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kesejahteraan guru (PAUD) di tingkat lokal. Selain itu, kajian ini juga ingin menegaskan kembali bahwa pengelolaan lembaga yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga mutu pendidikan anak usia dini, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini kemudian dirumuskan dengan judul “Analisis Dampak Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Guru PAUD di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Tahun 2025”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini kemudian difokuskan pada pertanyaan: seberapa besar pengaruh kebijakan efisiensi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan guru PAUD di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana efisiensi dalam pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap kesejahteraan guru PAUD di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan kajian administrasi publik, khususnya dalam konteks tata kelola lembaga (PAUD) yang hingga saat ini masih membutuhkan pengayaan melalui kajian empiris maupun pengembangan kerangka teoretis. Fokus utama penelitian ini adalah memperdalam pemahaman tentang hubungan antara efisiensi pengelolaan anggaran dengan kesejahteraan guru PAUD. Dengan menelaah keterkaitan kedua aspek tersebut, penelitian ini berupaya memperkuat landasan konseptual mengenai bagaimana praktik manajemen di lembaga pendidikan dapat berdampak langsung pada kondisi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoretis dalam pengembangan studi administrasi publik dan manajemen pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Temuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk merumuskan teori – teori baru maupun menyempurnakan teori yang telah ada, dengan penekanan pada bagaimana organisasi mampu membangun sistem yang lebih responsif

dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan guru sebagai elemen kunci dalam dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaatn Praktis

Bagi pemerintah, kajian ini diharapkan tidak berhenti sebatas laporan akademik, tetapi benar – benar memberi masukan yang relevan bagi pengelolaan dan penguatan sektor PAUD). Temuan yang dihasilkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru PAUD, terutama bagi mereka yang mengabdikan di lembaga – lembaga nonformal yang selama ini belum memperoleh dukungan negara secara optimal. Bagi pengelola lembaga PAUD, Penelitiann ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus mendorong penguatan sistem manajemen yang lebih transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara itu, bagi pengelola lembaga PAUD, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana efisiensi anggaran telah diterapkan secara efektif. Di sisi lain, hasil penelitiann ini juga dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem manajemen agar lebih transparan dan semakin berorientasi pada kesejahteraan tenaga pendidik.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk menyajikan uraian topik secara berurutan, logis, dan mudah dipahami. Penyusunan yang sistematis ini dimaksudkan agar pembaca dapat dengan mudah memahami seluruh isi penelitian, konteks permasalahan, landasan teori, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian. Struktur yang disusun dengan cermat ini juga dimaksudkan untuk memberikan alur berpikir yang jelas serta membentuk kerangka kerja yang koheren antara bab satu dengan bab yang lain.

Secara umum, proposal penelitian ini disusun dalam tiga bagian utama. Setiap bab memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung proses penyusunan serta pelaksanaan penelitian yang direncanakan. Bab I menjadi pondasi awal yang menjelaskan mengapa topik ini penting untuk dikaji, Bab II berisi landasan teoritis dan hasil studi terdahulu yang relevan, sementara Bab III menjabarkan secara rinci langkah – langkah teknis dalam proses penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian yang menegaskan urgensi pengkajian terhadap topik penelitian mengenai efisiensi serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kesejahteraan guru PAUD di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Uraian latar belakang disajikan secara bertahap, dimulai dari persoalan umum hingga mengerucut pada fokus penelitian. Bab ini berperan sebagai pijakan awal yang membingkai arah penelitian, menunjukkan signifikansi masalah yang diangkat, serta membentuk kerangka berpikir bagi keseluruhan proses penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II, pembahasan diarahkan pada kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan konseptual penelitian. Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel utama yaitu efisiensi anggaran dan kesejahteraan guru. Teori – teori tersebut mencakup definisi, prinsip, serta indikator dari setiap variabel yang diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat uraian pendukung yang berfungsi memperjelas keterkaitan antarkonsep sebagai dasar analisis penelitian memuat pembahasan yang mendukung perumusan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis dalam penelitian membuat landasan teoritis yang memberikan kerangka pemahaman terhadap hubungan antar variabel yang diteliti.

Bab ini juga menyajikan rangkuman hasil – hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian sebagai bentuk dukungan terhadap landasan teori sekaligus untuk menunjukkan adanya ruang atau celah penelitian yang belum banyak dibahas khususnya mengenai kesejahteraan guru PAUD. Melalui sintesis dari

teori dan penelitian terdahulu, disusunlah kerangka pemikiran yang menjelaskan secara sistematis dan logis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka pemikiran tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan hipotesis yang selanjutnya akan diuji melalui pendekatan kuantitatif. Jika rumusan hipotesis belum dimuat pada bab sebelumnya, maka bagian ini akan menutup dengan perumusan hipotesis sebagai dasar uji empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Pembahasan dalam bab ini mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta penentuan populasi dan sampel penelitian yang dijadikan sasaran kajian. Proses pemilihan responden melalui teknik sampling juga dipaparkan secara runut agar tahapan penelitian dapat dipahami secara menyeluruh.

Selanjutnya, dijabarkan pula cara pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa teknik, mulai dari penyebaran kuisioner, observasi langsung di lapangan, hingga penelaahan dokumen pendukung. Bab ini juga menguraikan instrumen yang digunakan untuk mengukur masing – masing variabel penelitian, beserta teknik analisis data yang diterapkan dalam pengolahan temuan penelitian. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efisiensi anggaran terhadap kesejahteraan guru PAUD, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana sebagai alat pengujian statistik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengolahan dan analisis data lapangan. Pembahasan diawali dengan pemaparan karakteristik responden sebagai gambaran umum subjek penelitian. Selanjutnya, ditampilkan hasil analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan data pada setiap variabel yang diteliti. Bab ini juga memuat hasil pengujian instrumen penelitian, meliputi analisis validitas, analisis reliabilitas sebagai dasar untuk memastikan kelayakan data yang digunakan. Tahap selanjutnya dilakukan analisis

inferensial melalui penerapan uji regresi linear sederhana guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil pengujian tersebut kemudian dibahas secara mendalam untuk menafsirkan makna empiris dan hasil penelitian serta menjelaskan implikasinya terhadap kesejahteraan guru PAUD di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian. Di dalamnya ditampilkan simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dengan menegaskan jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Selain memuat simpulan, bab ini juga menyajikan rekomendasi yang bersifat praktis bagi pihak-pihak terkait, sekaligus rekomendasi akademis sebagai dasar pengembangan penelitian di masa mendatang. Rekomendasi praktis ditujukan kepada pihak terkait, seperti pengelola PAUD dan pemangku kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Sementara itu, rekomendasi akademis diarahkan bagi peneliti selanjutnya sebagai masukan untuk pengembangan kajian yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang sama.

